

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Mekanisme Audit

(Purwanto Wahyudi) Mekanisme audit adalah metode atau teknik yang digunakan oleh para auditor untuk mengumpulkan dan mengapalusi bahan bukti yang mencukupi dan kompeten. Pilihan auditor tentang mekanisme audit dipengaruhi oleh faktor dari mana diperoleh, dikirimkan, diproses, dipelihara atau disimpan secara elektronik. Pengolahan komputer juga mempengaruhi pemilihan mekanisme audit. mekanisme ini juga dapat digunakan untuk mendukung pendekatan audit top-down ataupun pendekatan audit botton-up. Audit akan mempertimbangkan bagaimana setiap prosedur ini digunakan ketika merencanakan audit dan mengembangkan program audit sehingga dapat diterapkan dalam melakukan suatu pengauditan.

Pemilihan prosedur yang akan digunakan untuk menyelesaikan suatu tujuan audit tertentu terjadi dalam tahap perencanaan audit. Efektivitas prosedur dalam memenuhi tujjuan audit spesifik dan biaya pelaksanaan prosedur tersebut harus dipertimbangkan dalam pemilihan prosedur yang akan digunakan.

Mulyadi, 2014,9 Menyatakan bahwa pengertian audit: Secara umum auditing adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengepaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.

Menurut Sukrisno Agoes 2014,3. Pengertian Mekanisme auditing adalah Suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang imdependen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.

Jenis-jenis mekanisme audit setiap pemeriksaan dimulai dengan penetapan tujuan dan penentuan jenis pemeriksaan yang akan dilaksanakan yang tercantum dalam SPKN BPK RI (2017,9), atau lingkup pemeriksaan BPK RI (UU RI No. 15 Tahun 2004 Pasal 4) adalah sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Keuangan

Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai (Reasonable Assurance) apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

2. Pemeriksaan Kinerja

Pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan atas aspek efektivitas yang lazim dilakukan bagi kepentingan manajemen oleh aparat pengawasan intern pemerintah. Dalam melakukan pemeriksaan kinerja, pemeriksaan juga menguji kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan serta pengendalian intern. Pemeriksaan kinerja dilakukan secara objektif dan sistematis terhadap berbagai macam bukti, untuk dapat melakukan penilaian secara independen atas kinerja entitas atau program/kegiatan yang diperiksa. Contoh tujuan pemeriksaan atas hasil dan efektivitas program serta pemeriksaan atas ekonomi dan efisiensi adalah penilaian atas:

- a. Sejauh mana tujuan peraturan perundang-undangan dan organisasi dapat dicapai
- b. Kemungkinan alternatif lain yang dapat meningkatkan kinerja program atau menghilangkan faktor-faktor yang menghambat efektivitas program.
- c. Perbandingan antara biaya dan manfaat atau efektivitas biaya atau program
- d. Sejauh mana suatu program mencapai hasil yang diharapkan atau menimbulkan dampak yang tidak diharapkan.
- e. Sejauh mana program berduplikasi, bertumpang tindih atau bertentangan dengan program lain yang sejenis
- f. Sejauh mana entitas yang diperiksa telah mengikuti ketentuan pengadaan yang sehat.
- g. Validitas dan keandalan ukuran-ukuran hasil dan efektivitas program, atau ekonomi dan efisiensi.
- h. Keandalan, validitas dan relevansi informasi keuangan yang berkaitan dengan kinerja suatu program.

3. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT)

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu adalah pemeriksaan yang bertujuan untuk memberikan simpulan atas suatu hal yang diperiksa. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu dapat bersifat, Eksaminasi, Reviu, atau prosedur yang disepakati. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu meliputi antara lain pemeriksaan atas hal-hal lain di bidang keuangan, pemeriksaan investigatif, dan pemeriksaan atas sistem pengendalian intern.

2.1.2 Good Corporate Governance

Pengertian *Good Corporate Governance*

Good Corporate Governance berkaitan dengan pengambilan keputusan yang efektif, yang bersumber dari budaya perusahaan, etika, nilai, sistem, proses, bisnis, kebijakan dan struktur organisasi yang bertujuan untuk mendorong dan mendukung pengembangan perusahaan, pengelolaan sumber dayadan resiko secara lebih efisien dan efektif dan pertanggungjawaban perusahaan kepada penegang saham dan stokholders lainnya.

Menurut Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-01/MBU/2011 definisi tata kelola perusahaan yang baik adalah: Perinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha.

Menurut *The Indonesian Institute for corporate governance* (IICG) dalam Hamdani (2016, 20), definisi dari *good corporate governance* adalah sebagai berikut: *Good Corporate Governance* sebagai proses dan struktur yang di terapkan dalam menjalankan perusahaan, dengan tujuan utama meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dan memperhatikan kepentingan pihak petaruh lainnya.

Menurut Wahyudi Prakasa dalam Sedarmayanti (2012, 54) *Good Corporate Governance* dapat di definisikan sebagai berikut: *Good Corporate Governance* yaitu mekanisme administratif yang mengatur hubungan-hubungan antara manajemen perusahaan, komisaris, direksi, pemegang saham dan kelompok-kelompok kepentingan (stakeholders) yang lainnya. Hubungan-hubungan ini di manifestasikan dalam berbagai bentuk aturan permainan dan sistem insentif sebagai kerangka kerja yang di perlukan untuk menentukan tujuan-tujuan perusahaan dan cara-cara pencapaian tujuan serta pemantauan kinerja yang dihasilkan.

Sedangkan definisi *Good Corporate Governance* yang dikemukakan oleh *Organization For Economic Co-Operation And Developmen* (OCED) (yang dikutip oleh Sri Fadilah tahun 2011) mendefinisikan *Corporate Governance* sebagai berikut:

Maksud defini tersebut bahwa suatu sistem yang dipergunakan untuk mengarahkan dan mengadakan kegiatan bisnis perusahaan. *Corporate Governance* mengatur pembagian tugas, hak dan kewajiban mereka yang berkepentingan terhadap kehidupan perusahaan, termasuk para pemegang saham, dewan pengurus, para manajer, dan semua stakeholders non pemegang saham.

Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance*

Menurut Sutedi (2012, 11) kesadaran pentingnya pengolaan perusahaan yang baik itu sangat diharapkan terdapat didalam setiap perusahaan. Kesadaran ini diperlukan agar informasi yang dikeluarkan setiap perusahaan dapat dipercaya kebenarannya.

Adapun beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam *Corporate Governance*, yaitu sebagai berikut (Sutedi, 2012, 11).

1. Transparasi

Perusahaan harus memiliki informasi yang memadai, akurat, dan tepat waktu kepada stokeholder. Perusahaan harus meningkatkan kualitas, kuantitas, dan frekuensi dari pelaporan keuangan, ini semua untuk mengurangi kegiatan curang seperti manipulasi laporan (*creative accounting*) atau manajemen laba (*earnings managemen*), pengakuan pajak yang salah, dan penerapan dari prinsip pelaporan yang cacat.

2. Dapat di pertanggung jawabkan (*Accountability*)

Setiap hal yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka kegiatan perusahaan itu harus dilaporkan atau harus diketahui oleh *Stokeholders*. Apalagi, bila dalam perusahaan tersebut terjadi kesalahan seperti integritas manajemen yang rendah, etika bisnis yang buruk, dan aturan kekuatan dari pda kekuatan hukum.

3. Kejujuran (*Fairness*)

Investor harus memiliki hak-hak yang jelas tentang kepemilikan sistem dari aturan dan hukum yang dijalankan untuk melindungi hak-haknya. Sehingga, perusahaan ditentukan harus memiliki kejujuran terhadap *stokeholders*.

Tedapat perbedaan pendapat tentang prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, tentang yang dikemukakan Daniri (2014, 25) ini sama seperti yang dikemukakan dalam Keputusan Menteri BUMN No.117/2002 mengenai *Good Corporate Governance*.

1. Keterbukaan

Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi material dan relevan mengenai efektif.

2. Akuntabilitas

Kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggung jawaban organ perseroan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

3. Pertanggung jawaban

Kesesuaian dalam pengolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

4. Kemandirian

Suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa bantuan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

2.1.3 Independensi Auditor

Independensi Auditor merupakan suatu akuntan publik yang bersertifikat atau kantor akuntan publik yang melakukan audit atas entitas keuangan komersial maupun non komersial, (Carolita dan Rahardjo, 2012). Profesi auditor yang kompleks dan hanya dapat dilakukan oleh individu dengan kemampuan dan latar pendidikan tertentu. Salah satu tugas auditor dalam menjalankan profesinya yaitu untuk menyediakan sebuah informasi yang sangat berguna bagi publik untuk suatu pengambilan keputusan ekonomi.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kemampuan auditor, yang pengetahuan dan pengalaman. Untuk melakukan tugas pengauditan, Auditor memerlukan pengetahuan pengauditan dan pengetahuan mengenai bidang auditing dan akuntansi. Selain itu, Corolita dan Rahardjo, (2012) Menyatakan bahwa akuntan dipandang sebagai suatu profesi karena memiliki ciri-ciri berupa.

1. Membutuhkan dasar pengetahuan tertentu untuk melaksanakan pekerjaan profesi tersebut dengan baik (*Comman body of knowledge*).
2. Memiliki syarat-syarat tertentu untuk menerima anggota (*Standard of admittancece*).
3. Mempunyai kode etik dan aturan main (*Code of ethic and code of conduct*).
4. memiliki standar untuk menilai pekerjaan (*Standard of performance*).

Dalam hal ini, berarti di dalam diri seorang akuntan profesional terdapat suatu sistem nilai atau norma yang mengatur perilaku mereka dalam proses pelaksanaan tugas. Pengembangan dan kesadaran etik atau moral memainkan peran penting dalam semua era profesi akuntansi (Louwers dkk., 1997 dalam Carolita, dkk 2012)

Prinsip-prinsip perilaku yang berlaku bagi auditor antara lain integritas, obyektifitas dan kompetensi. Integritas diperlukan agar auditor dapat bertindak jujur dan tegas dalam melaksanakan audit. Obyektifitas diperluakan agar auditor dapat bertindak adil tanpa dipengaruhi oleh tekanan atau permintaan pihak tertentu yang berkepentingan atas hasil audit serta kopetensi auditor didukung oleh pengetahuan, dan kemampuan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas (Ayuningtyas dan Sugeng 2012).

Independensi auditor adalah auditor yang tidak mudah dipengaruhi dan bebas dari tekanan pihak manajemen dan pihak manapun dalam melakukan audit. Maka dari itu akuntan atau auditor independen tidak memihak kepada pihak manajemen atau yang lain hal ini dilakukan agar hasil proses audit dapat bersifat relevan dan reliabel. Menurut Arens et al, (2014, 103), independensi akuntan publik memiliki dua komponen.

1. Independensi dalam berpikir (*Independent in mind*)

Independensi dalam berpikir adalah mencerminkan pikiran auditor yang memungkinkan audit dilaksanakan dengan sikap yang tidak bias.

2. Independensi dalam penampilan (*Independent in appearance*)

Independensi dalam penampilan adalah hasil dari interpretasi lain atas independensi ini.

Faktor-faktor yang mengganggu independensi auditor menurut Mulyadi (2014, 27) antara lain.

1. Sebagai seseorang yang melaksanakan audit secara independen, audit dibayar oleh kliennya atas jasa tersebut.
2. Sebagai penjual jasa seringkali auditor mempunyai kecendrungan untuk memuaskan kliennya.
3. Mempertahankan sikap mental independen seringkali dapat menyebabkan lepasnya klien.

Menurut Law, et al (2012) independensi diukur dengan menggunakan empat indikator yaitu lama hubungan auditor dengan klien, tekanan dari klien, telaah dari rekan auditor, (per review) dan jasa non audit. Lamanya hubungan auditor dengan klien seorang auditor memiliki masa kerja paling lama 3 tahun pada kantor akuntan publik yang sama sementara untuk kantor akuntan publik 5 tahun Law, et al (2012). Tekanan dari klien, dalam kondisi keuangan yang sehat klien dapat menekan auditor dengan cara melakukan pergantian auditor. Sari dan Sundana (2013). Telaah dari rekan auditor (per review) bermanfaat bagi, baik klien kantor akuntan publik, maupun auditor yang terlibat dalam pereview antar lain mengurangi resiko tuntutan (Litigation), memberikan pengalaman positif, mempertinggi modal kerja, memberikan competitive edge dan lebih meyakinkan klien atas kualitas jasa yang diberikan Harjanti (2002, 59). Jasa yang diberikan oleh kantor akuntan publik buakan hanya jasa astestasi melainkan juga jasanon astestasi yang berupa jasa konsultasi manajemen dan perpajakan serta jasa akuntansi seperti jasa penyusunan laporan keuangan Kusharyanti (2003). Menurut Arens et al (2012, 103), ada sembilan jasa audit yang tidak diperkenankan yaitu:

1. Jasa pembukuan dan akuntansi lain
2. Perancangan dan inplementasi sistem informasi keuangan
3. Jasa penaksiran atau penilaian
4. Jasa aktuarial
5. Outsourcing audit internal
6. Fungsi manajemen dan sumber daya
7. Jasa pialag atau dealer atau penasehat investasi atau bank investasi
8. Jasa hukum dan pakar yang tidak berkaitan dengan audit
9. Semua jasa lain yang ditentukan oleh peraturan PCAOB sebagai tidak diperkenankan.

2.1.4 Kulit Audit

Kualitas audit pemerolehan dan penilaian bukti yang mendasari laporan keuangan historis suatu entitas yang berisi asersi yang dibuat oleh manajemen entitas tersebut. Atas dasar audit yang dilaksanakan terhadap laporan keuangan historis suatu entitas, auditor menyatakan suatu pendapat mengenai apakah laporan keuangan tersebut menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan dan hasil usaha entitas sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum (Mulyadi, 2013, 5)

Adapun Menurut Rosnidah dalam Tarigan dan Susanti (2013) menggambarkan bahwa;

Kualitas audit adalah Pelaksanaan audit yang dilakukan sesuai standar sehingga auditor mampu mengungkapkan dan melaporkan apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan klien, standar yang mengatur audit di Indonesia adalah Standar Akuntan Publik.

Selain itu Menurut Basuki (2006) dalam Bangun (2011) Mengatakan: Kualitas Audit adalah pemeriksaan yang sistematis dan independen untuk menentukan aktivitas, mutu dan hasilnya sesuai dengan peraturan yang telah direncanakan apakah pengaturan tersebut diimplementasikan secara efektif dan cocok dengan tujuan.

Jadi dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kualitas audit merupakan suatu probabilitas dimana auditor menemukan dan melaporkan adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi klien. Definisi tersebut memecah kualitas audit menjadi dua komponen yaitu:

1. Kemungkinan auditor menemukan adanya salah saji. Disini dapat dilihat bagaimana kompetensi auditor dan tindakan sementara apa yang akan dilakukan.
2. Tindakan yang tepat dalam menangani salah saji tersebut. Ini berkaitan dengan obyektivitas auditor, skeptisisme profesional, dan kemandirian. Berdasarkan uraian di atas tergambar bahwa audit memiliki fungsi sebagai proses untuk mengurangi ketidakselarasan informasi yang terdapat antara manajer dan para pemegang saham dengan menggunakan pihak luar untuk memberikan pengesahan terhadap laporan keuangan.

Para pengguna laporan keuangan terutama para pemegang saham akan mengambil keputusan berdasarkan pada laporan yang telah dibuat oleh auditor. Hal ini berarti auditor mempunyai peranan penting dalam pengesahan laporan keuangan suatu perusahaan. Oleh karena itu auditor harus menghasilkan audit yang berkualitas sehingga dapat mengurangi ketidakselarasan yang terjadi antara pihak manajemen dan pemilik (Elfarini, 2007).

Langkah-Langkah Yang Dilakukan Untuk Meningkatkan Kualitas Audit

Kualitas audit dinilai melalui sejumlah unit standarisasi dari bukti audit yang diperoleh oleh auditor eksternal, dan kegagalan audit dinyatakan juga sebagai kegagalan auditor independen untuk mendeteksi

suatu kesalahan material. Para praktisi audit harus mengetahui dengan baik apa yang membuat suatu audit itu berkualitas. Menurut Aldhizer et al (1995) dalam Nasrullah Djamil (2007, 18) beberapa karakteristik yang berkaitan dengan kualitas audit adalah.

1. Perlunya melanjutkan pendidikan profesionalnya bagi suatu tim audit, sehingga mempunyai keahlian dan pelatihan yang memadai untuk melaksanakan audit.
2. Dalam hubungannya dengan penugasan audit selalu mempertahankan independensi dalam sikap mental, artinya tidak mudah dipengaruhi, karena ia melaksanakan pekerjaan untuk kepentingan umum. Sehingga ia tidak dibenarkan memihak kepada kepentingan siapapun.
3. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan, auditor tersebut menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama, maksudnya petugas audit agar mendalami standar pekerjaan lapangan dan standar laporan dengan semestinya. Penerapan kecermatan dan keseksamaan diwujudkan dengan melakukan review secara kritis pada setiap tingkat supervise terhadap pelaksanaan audit dan terhadap pertimbangan yang digunakan.
4. Melakukan perencanaan pekerjaan audit dengan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten maka dilakukan supervise dengan semestinya. Kemudian dilakukan pengendalian dan pencatatan untuk semua pekerjaan audit dan terhadap pertimbangan yang digunakan.
5. Melakukan pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern klien untuk dapat perencanaan audit, menentukan sifat dan lingkup pengujian yang akan dilakukan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi Kualitas Audit

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Deis dan Giroux (1992) dalam Nasrullah Djamil (2007, 13) empat faktor yang dapat mempengaruhi kualitas audit adalah:

1. Tenure
Lama waktu auditor telah melakukan pemeriksaan terhadap suatu perusahaan, semakin lama seorang auditor telah melakukan audit pada klien yang sama maka kualitas audit yang dihasilkan semakin rendah. Karena auditor menjadi kurang memiliki tantangan dan prosedur audit yang dilakukan kurang inovatif atau mungkin gagal untuk mempertahankan sikap skeptisme profesional.
2. Jumlah klien
Semakin banyak jumlah klien maka kualitas audit akan semakin baik, karena auditor dengan jumlah klien yang banyak akan berusaha menjaga reputasinya.
3. Kesehatan Keuangan Klien

Semakin sehat kondisi keuangan klien maka akan ada kecendrungan klien tersebut untuk menekan auditor agar tidak mengikuti standar. Kemampuan auditor untuk bertahan dari tekanan klien adalah tergantung pada kontrak ekonomi dan kondisi lingkungan dan gambaran perilaku auditor, termasuk didalamnya adalah:

- a) Pernyataan etika profesional
 - b) Kemungkinan untuk dapat mendeteksi kualitas yang buruk
 - c) Figur dan visibility untuk mempertahankan profesi
 - d) Auditing berada (menjadi) Anggot komunitas profesional
 - e) Tingkat interaksi auditor dengan kelompok profesional peer groups dan
 - f) Normal Internasional profesi auditor
4. Review oleh pihak ketiga

Kualitas audit akan meningkat jika auditor tersebut mengetahui bahwa hasilpekerjaannya akan di review oleh pihak ketiga.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas audit diantaranya sebagai berikut: Menurut Winda Kurnia, Khomsiyah dan sofie (2014) Faktor yang mempengaruhi kualitas audit yaitu:

1. Kompetensi
2. Independensi
3. Teknan waktu dan
4. etika

Menurut Restu Agusti dan Nastia Putri (2013) Faktor yang mempengaruhi Kualitas audit yaitu:

1. Kompetensi
2. Independensi dan
3. Profesionalisme

Menurut Komang Ayu Lely Aryani (2015) faktor yang mempengaruhi kualitas audit:

1. Kompetensi
2. Independensi dan
3. Skeptimisme Profesional

Menurut Malem Ukur Tarigan dan Primsa bangun Susanti (2013) faktor yang mempengaruhi kualitas audit:

1. Etika profesi
2. Fee Audit

2.1.4 Manajemen Laba

Manajemen laba yang dilaporkan berpengaruh kuat terhadap kegiatan perusahaan dan keputusan yang dibuat oleh manajemennya. Keasikan perusahaan memenuhi harapan pasar modal mencerminkan bahwa manajemen sangat peduli terhadap resiko nilai saham perusahaan bila gagal.

Menanggapi resiko tersebut, manajemen mungkin berpandangan bahwa tanggung jawabnya adalah melakukan apa saja yang memungkinkan dalam batasan tertentu agar ramalan pasar modal oleh para analis dapat dipenuhi atau dilebihi, atau melakukan manajemen laba.

Manajemen laba dipandang sebagai suatu konsep lintas priode, dimana laba digeser dari satu priode ke priode lainnya. sampai saat ini manajemen laba belum didefinisikan secara umum. Walaupun demikian beberapa definisi sudah dapat diterima secara luas.

Pengertian *earning management* menurut Theodorus M. Tuanakotta (2013, 210) adalah sebagai berikut:

Pengelolaan laba adalah bagian-bagian dari rekayasa keuangan yang lazim dipasar modal. Magrath dan Weld membedakan kegiatan pengelolaan laba yang merupakan praktik bisnis yang sehat (*good businnes practices*) dan pengelolaan laba yang merupakan penyalahgunaan. Pengelolaan laba yang merupakan penyalahgunaan selanjutnya diistilahkan sebagai pengelolaan laba abusif. bertujuan menipu masyarakat penanam modal.

Menurut Charles W. Mulford dan Eugene E. Comiskey (2010, 81) *earning management* adalah:

Manajemen laba adalah manipulasi akuntansi dengan tujuan menciptakan kinerja perusahaan agar terkesan lebih baik dari yang sebenarnya.

manajer dapat memilih kebijakan akuntansi dari sekumpulan aturan (Misal, GAAP), wajar jika diharapkan bahwa manajer akan memilih kebijakan yang dapat memaksimalkan kepentingan mereka dan nilai pasar sahamnya. ini disebut manajemen laba.

Menurut mulyadi (2006, 26) manajemen laba dapat dilakukan dengan cara maksimalisasi laba. Maksimalisasi laba merupakan maksimalisasi penghasilan perusahaan setelah pajak. mekanisme laba sering dianggap tujuan perusahaan.

Berdasarkan beberapa pengertian dari para ahli sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa manajemen laba dilakukan secara sengaja, dalam batasan untuk mengarah pada suatu tingkat laba yang diinginkan. Tindakan ini merupakan tindakan manajer untuk meningkatkan (mengurangi) laba yang dilaporkan saat ini atas unit dimana manajer bertanggung jawab, tanpa mengakibatkan peningkatan (penurunan) probabilitas ekonomis jangka panjang unit tersebut.

Bentuk-bentuk Manajemen Laba

Bentuk-bentuk manajemen laba yang dikemukakan oleh Scott (2003, 383) meliputi:

1. *Talking a bath*
2. *Income minimization*
3. *Income maximization*
4. *Income smothering*
5. *Timing revenue and expenses recognition*

Adapun penjelasan mengenai bentuk-bentuk manajemen laba diatas adalah sebagai berikut:

1. *Talking a bath*

Disebut juga big baths, bisa terjadi selama periode dimana terjadi tekanan dalam organisasi atau terjadi reorganisasi, misalnya penggantian direksi. Jika teknik ini digunakan maka biaya-biaya yang ada pada periode yang akan datang diakui pada periode berjalan. ini dilakukan jika kondisi yang tidak menguntungkan bisa dihindari. Akibatnya laba periode yang akan datang menjadi tinggi meskipun kondisi tidak menguntungkan.

2. *Income minimization* (Menimbulkan Laba)

Pola meminimumkan laba mungkin dilakukan karena motif politik atau motif meminimumkan pajak. Cara ini dilakukan pada saat perusahaan memperoleh profitabilitas yang tinggi dengan tujuan agar tidak mendapat perhatian secara politis. Kebijakan yang diambil dapat berupa penghapusan (*write off*) atas barang-barang modal dan aktiva tak berwujud, pembebanan pengeluaran iklan, riset dan pengembangan yang cepat.

3. *Income maximization* (Memaksimalkan laba)

Memaksimalkan laba bertujuan untuk mempetrend peroleh bonus yang lebih besar, selain itu memperoleh bonus yang lebih besar, selain itu tindakan ini juga bisa dilakukan untuk menghindari pelanggaran atas kontrak hutang jangka panjang (*debt Covenant*).

4. *Income smothering* (Perataan Laba)

Perusahaan umumnya lebih memilih untuk melaporkan trend pertumbuhan laba yang stabil dari pada menunjukkan perubahan laba yang meningkat atau menurun secara drastis.

5. *Timing revenue and expenses recognition* (Pengakuan pendapatan dan beban)

Teknik ini dilakukan dengan membuat kebijakan tertentu yang berkaitan dengan timing suatu transaksi, misalnya pengakuan premature atas pendapatan.

Manajemen laba pilihan manajer tentang kebijakan akuntansi untuk mencapai tujuan khusus (Rahmawati 2012), Manajemen laba digunakan untuk membuat laporan keuangan yang

baik. Adanya keuangan yang baik tentu saja investor tertarik membeli saham diperusahaan tersebut karena dinilai memiliki kinerja yang baik.

Menurut (Wirakusuma, 2016) Manajemen laba adalah suatu proses yang disengaja, dengan batasan standar akuntansi keuangan untuk mengarahkan pelaporan laba pada tingkat tertentu.

Manajemen laba merupakan sifat akuntansi yang mengandung taksiran (*estimasi*) pertimbangan (*judgment*) dan sifat *accrual* membuka peluang untuk bisa mengatur laba (Sofyan Harahap, 2011). Manajemen laba dilakukan dengan mempermainkan komponen akrual dalam laporan keuangan atau memanipulasi, karena akrual adalah komponen yang mudah dipermainkan sesuai keinginan ataupun tujuan orang yang melakukan pencatatan laporan keuangan.

Manajemen laba bukanlah suatu hal yang merugikan selama dilakukan dalam koridor-koridor peluang, manajemen laba tidak selalu diartikan dengan proses manipulasi laporan keuangan karena terdapat beberapa metode yang dapat digunakan dan bukan suatu larangan (Kususma Wardani, 2012). Perilaku manajemen laba merupakan salah satu bentuk tindakan *creative accounting* dari manajer, tentunya tidak muncul dengan sendirinya, melainkan ada motivasi ekstinsik dibalik perilaku tersebut (Dadhy Sulistiawan 2011)

Teknik Manajemen Laba

Teknik dan pola manajemen menurut Dedhy Sulistiawan, Yeni Januari, dan Liza Alvia (2010, 42) dapat dilakukan dengan tiga teknik yaitu:

1. Manfaat peluang untuk membuat estimasi akuntansi
2. Mengubah metode akuntansi
3. Menggeser periode biaya atau pendapatan

Adapun penjelasan teknik *earnings management* di atas berikut:

1. Cara manajemen mempengaruhi laba melalui *judgmen* (perkiraan) terhadap estimasi akuntansi antara lain estimasi tingkat piutang tak tertagih, estimasi kurun waktu depresiasi aktiva tetap atau amortisasi aktiva tak berwujud, estimasi biaya garansi, dan lain-lain.
2. Perubahan metode akuntansi yang digunakan untuk mencatat suatu transaksi. Contoh: Merubah metode depresiasi aktiva tetap, dari metode depresiasi angka tahun ke metode depresiasi garis lurus.
3. Contoh rekayasa periode biaya atau pendapatan antar lain: Mempercepat atau menunda pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan sampai pada periode akuntansi berikutnya, mempercepat atau menunda pengeluaran atau promosi sampai priode

berikutnya, mempercepat atau menunda pengiriman produk ke pelanggan, mengatur saat penjualan aktiva tetap yang sudah tak dipakai.

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya manajemen laba yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. Rusmin (2010) meneliti tentang kualitas auditor dan manajemen laba. Penelitian ini fokus pada manajemen laba dan menanggapi tekanan antara investor, pembuat kebijakan dan *good corporate governance* untuk mengurangi perilaku oportunistik yang berlebihan dikalangan manajemen perusahaan.

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Judul	Variabel	Hasil
1.	Gideon SB. Boediono (2005)	Kualitas laba: Studi pengaruh mekanisme Corporate governance dan dampak manajemen laba	Variabel dependen: Kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan komposisi dewan komisaris. Variabel independen: Manajemen laba. Model regresi berganda	Kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan komposisi dewan komisaris berpengaruh positif terhadap manajemen laba.
2.	Sylvia Veronica dan Siddharta Utama (2005)	Pengaruh setruktur kepemilikan ukuran perusahaan dan peraktek <i>Corporate governance</i> terhadap pengelolaan laba (<i>earning management</i>)	Variabel dependen: Manajemen laba. Variabel independen: Kepemilikan keluarga, kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, ukuran KAP, proporsi dewan komisaris independen dan keberadaan komite audit. Variabel kontrol: debt (total hutang dibagi total aset) Model: Regresi berganda	Kepemilikan keluarga dan kepemilikan institusional berhubungan positif, Ukuran perusahaan berhubungan negatif, Ukuran KAP berhubungan negatif, proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif dan keberadaan komite audit berpengaruh negatif, sedangkan debt berpengaruh positif signifikan dengan manajemen laba
3.	Ujiyanto dan Pramuka (2007)	Mekanisme <i>Corporate Governance</i> , manajemen laba dan kinerja keuangan	Variabel dependen: Kepemilikan Institusional, kepemilikan manajerial, proporsi dewan komisaris independen, ukuran dewan komisaris	1. Kepemilikan institusional dan jumlah dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. 2. Kepemilikan manajerial

			independen, ukuran dewan komisaris. Variabel independen: Manajemen laba dan kinerja keuangan.	berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. 3. Proporsi dewan komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba. 4. Secara bersama-sama mekanisme <i>corporate governance</i> teruji signifikan terhadap manajemen laba. 5. Manajemen laba tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan
4.	Carcello, et al (2006)	Pengaruh hubungan antara keahlian keuangan komite audit dengan mekanisme tata kelola perusahaan terhadap manajemen laba.	Variabel dependen: Manajemen laba. Variabel independen: Keahlian keuangan komite audit	Tidak terdapat asosiasi antar keahlian keuangan dengan manajemen laba.
5.	Susiana dan Herawati (2007)	Analisis pengaruh independensi, Mekanisme Corporate Governance, dan kualitas audit terhadap integritas laporan keuangan	Variabel dependen: Integritas laporan keuangan diukur dengan indeks konservatisme. Variabel independensi: Mekanisme <i>Corporate Governance</i> diproses dengan presentase kepemilikan institusi, presentase kepemilikan manajerial, Komite audit, dan komisaris independen	Penelitian ini menghasilkan bahwa independensi auditor, mekanisme <i>corporate governance</i> dan kualitas audit memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap integritas laporan keuangan.
6.	Tarjo (2008)	Pengaruh konsentrasi kepemilikan institusional dan <i>leverage</i> manajemen laba nilai pemegang saham serta <i>Cost Of Equity Capital</i>	Variabel dependen: Manajemen laba, nilai pemegang saham, dan <i>Cost Of Equity Capital</i> . Variabel independen: Kepemilikan institusional dan <i>leverage</i> .	Konsentrasi kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba, <i>Leverage</i> berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba.
7.	Murhadi (2009)	Pengaruh <i>Good</i>	Variabel dependen:	1. CEO Duality dan

		<i>corporate Governance</i> terhadap praktik manajemen laba oleh perusahaan.	Manajemen laba. Variabel independen <i>Good Corporate Governance</i>	keberadaan pemegang saham berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. 2. Komisaris independen komite audit, koalisi pemegang saham tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.
8.	Tri Widyastuti (2009)	Pengaruh struktur kepemilikan dan kinerja keuangan terhadap manajemen laba	Variabel dependen: Kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, <i>size</i> , <i>leverage</i> , profitabilitas. Variabel independen: Manajemen laba	Kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>earnings management</i> ukuran perusahaan <i>leverage</i> dan profitabilitas mempunyai pengaruh signifikan terhadap <i>earnings management</i>
9.	Welvin I Guna dan Herawaty (2010)	Pengaruh Mekanisme <i>Good Corporate Governance</i> Independensi Auditor Kualitas Audit Dan Faktor Lainnya Terhadap Manajemen Laba	Variabel dependen: Manajemen laba. Variabel independen: Mekanisme <i>Good Corporate Governance</i> (Kepemilikan institusional, kepemilikan manajemen komite audit, komisaris independen, independensi auditor <i>leverage</i> kualitas audit, profitabilitas dan ukuran perusahaan	Hasil penelitian menemukan bahwa <i>leverage</i> , kualitas audit dan profitabilitas berpengaruh terhadap manajemen laba. Sedangkan kepemilikan institusional kepemilikan manajemen komite audit komisaris independen, independensi dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.
10.	Widiatmadja (2010)	Pengaruh mekanisme <i>Corporate Governance</i> terhadap manajemen laba dan konsekuensi manajemen laba terhadap kinerja keuangan	Variabel dependen: Manajemen laba dan kinerja keuangan. Variabel independen kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial proposrsi dewan komisaris independen jumlah dewan komisaris, ukuran komite audit.	1. Kepemilikan manajerial dan ukuran komite audit berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. 2. Kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris independen dan ukuran komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. 3. Manajemen laba berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.
11.	Yohana dan Loksito (2010)	Pengaruh kualitas auditor <i>Corporate</i>	Variabel independen: Kualitas auditor <i>Corporate governance leverage</i> dan	Variabel yang memiliki pengaruh signifikan terhadap manajemen laba

		<i>Governance Leverage</i> dan kinerja keuangan terhadap manajemen laba.	kinerja keuangan variabel dependen manajemen laba.	adalah kualitas auditor, kepemilikan manajerial, kepemilikan <i>institutional</i> , and <i>Current Asset Ratio</i> .
12.	Prasetyo (2011)	Pengaruh <i>Corporate Governance Bonus Plans, debt Covenant, and firm size</i> terhadap manajemen laba.	Variabel dependen: Manajemen laba. Variabel independen: Komisaris independen, komite audit reputasi auditor, <i>Bonus plans, debt covenant firm size</i> .	<i>Firm Size</i> berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba, sedangkan variabel lain tidak berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba.

2.3 Kerangka Konseptual

Dibawah ini, pada gambar 2.1 adalah bagan yang menggambarkan hubungan antara variabel bebas (independen), baik tunggal maupun jamak dalam kaitannya dengan variabel terikat (dependen). Sehingga interpretasi variabel bebas (X) dapat memengaruhi variabel terikat (Y), perubahan nilai variabel dependen dimaksudkan agar dapat memenuhi titik cerah bagi peneliti sesuai dengan rumusan masalah yang telah dibuat.

2.3.1 Bagaimana pengaruh mekanisme audit terhadap manajemen laba

Audit merupakan mekanisme terpenting dalam tata kelola perusahaan yang dapat menghambat manajemen laba, sebab audit merupakan bagian yang bertanggung jawab untuk memastikan, akurasi dan reliabilitas laporan keuangan yang disediakan manajemen (Ayemere dan Elijah, 2015). FCGI (2001) menjabarkan mengenai tiga tanggung jawab audit. Pertama: memastikan laporan keuangan yang diterbitkan perusahaan telah mencerminkan keadaan sebenarnya. Kedua: Bertanggung jawab terhadap tata kelola perusahaan guna memastikan bahwa perusahaan menjalankan usahanyasesuai dengan ketentuan hukum dan undang-undang, menjalankan bisnisnya secara etis, serta melakukan pengawasan dengan efektif terkait benturan kepentingan dan kecurangan yang terjadi di perusahaan. Ketiga: Audit bertanggung jawab dalam pengawasan perusahaan. Wolnizer (1995) menyebutkan bahwa implementasi tanggung jawab komite audit dapat meningkatkan kredibilitas, reliabilitas, dan 803 JRAK 6,1 Objektivitas laporan keuangan, meningkatkan akuntabilitas manajemen, mengurangi sifat oportunistis, serta meningkatkan efisiensi pengendalian internal.

2.3.2 Bagaimana pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap manajemen laba

Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap manajemen laba. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen dalam penerapan mekanisme *Corporate Governance* dalam mencegah tindakan manajemen laba yang berlebihan.

Manajemen laba terjadi ketika manajemen menggunakan keputusan tertentu dalam laporan keuangan dan transaksi untuk mengubah laporan keuangan sebagai dasar kinerja perusahaan yang bertujuan menyesatkan pemilik atau pemegang saham (Richardson, 1998; dalam Kusunawati, dkk 2013). Peraktek manajemen laba tidak dapat dipisahkan dari adanya teori keagenan dan teori persinyalan teori keagenan merupakan dasar yang digunakan untuk memahami *Corporate Governance* dimana masing-masing individu termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga dapat menimbulkan konflik antara prinsipal dan agen.

2.3.3 Bagaimana pengaruh independensi auditor terhadap manajemen laba

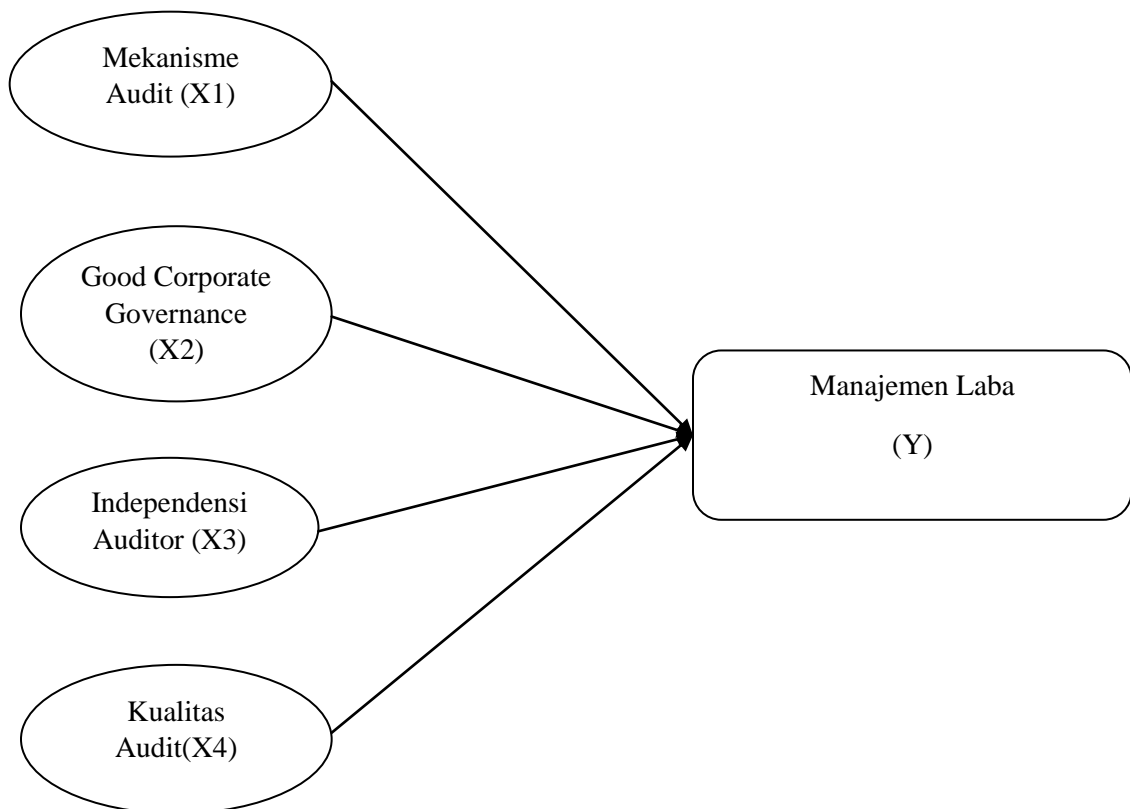
Independensi auditor akan berdampak terhadap pendeteksian manajemen laba. Auditor yang independen merupakan salah satu faktor yang dapat mengurangi terjadinya manajemen laba. Independensi auditor dinilai dari lamanya penugasan auditor tersebut di perusahaan yang sama. Semakin lama auditor melaksanakan audit pada suatu perusahaan, maka auditor dianggap tidak independen.

2.3.4 Bagaimana pengaruh kualitas audit terhadap manajemen laba

kualitas audit dapat diukur dengan menggunakan ukuran KAP (KAP The Big-4 dan KAP non The big-4) dan spesialisasi industri auditor (Gerayli et al, 2011). Menyatakan bahwa ukuran KAP berhubungan negatif dengan manajemen laba yang diukur dengan *discretionary accrual*. Rusmin (2010) dan Meutia (2004) menyatakan bahwa tindakan manajemen laba terhadap hasil audit yang dilakukan oleh KAP The big-4 lebih rendah dari pada KAP non The big-4. Penelitian yang dilakukan Gramling et al (2001). Menunjukkan bahwa penggunaan spesialisasi industri auditor dapat mengetahui adanya manajemen laba, kesalahan prediksi dan kemampuan untuk memprediksi arus kas mendatang. Hal ini berarti laba perusahaan yang di audit oleh spesialisasi industri auditor mempunyai daya prediksi arus kas mendatang yang lebih akurat dibandingkan dengan auditor non spesialisasi industri. Becker et al (1998). menjelaskan bahwa adanya spesialisasi industri auditor dapat mendeteksi manajemen laba karena spesialisasi industri auditor memiliki pengetahuan lebih (*Superior knowledge*) tentang industri tertentu. Manajemen laba merupakan fenomena dalam bidang akuntansi yang masih sangat penting untuk diteliti pada saat ini, walaupun memang sudah cukup banyak peneliti yang melakukan penelitian mengenai manajemen laba.

Peneliti masih tertarik untuk melakukan penelitian mengenai manajemen laba karena berdasarkan hasil penelitian Leuz et al (2003). Menunjukkan bahwa indonesia berada dalam kluster negara-negara dengan perlindungan investor yang lemah, terjadinya praktik manajemen laba yang tinggi.

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual



2.4 Hipotesis

Berdasarkan landasan teori diatas maka hipotesis-hipotesis yang akan di uji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H1 : Bagaimana Pengaruh Mekanisme Audit Terhadap Manajemen Laba.
- H2 : Bagaimana Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba.
- H3 : Bagaimana Pengaruh Independensi Auditor Terhadap Manajemen Laba.
- H4 : Bagaimana Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Manajemen Laba.